ARTIKEL

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 – 2016



Oleh:

SANTI WIDYAYANA NPM: 13.1.02.01.0038

Dibimbing oleh:

- 1. Linawati, S.Pd., M.Si.
- 2. Mar'atus Solikah, M.Ak.

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2017



SURAT PERNYATAAN **ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap

: SANTI WIDYAYANA

NPM

: 13.0.02.01.0038

Telepon/HP

: 085736842107

Alamat Surel (Email)

: Santiwidyasari68@yahoo.co.id

Judul Artikel

:Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi

Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2013 - 2016

Fakultas-program Atudi

: Ekonomi-Akuntansi

Nama Perguruan Tinggi

: Universitas Nusantara PGRI Kediri

Alamat Perguruan Tinggi : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.76, Mojoroto, Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. Artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme:

b. Artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Mengetahui		Kediri, 31-07-2017
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Mish	Carl	FIM
LINAWATI, M.Si. NIDN. 0708048501	Mar'atus Solikah, M.Ak. NIDN. 0709047405	Santi Widyayana NPM: 13.1.02.01.0038



ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 – 2016

SANTI WIDYAYANA

NPM: 13.1.02.01.0038

Ekonomi - Akuntansi

Email: Santiwidyasari68@yahoo.co.id

Linawati, S.Pd., M.Si. dan Mar'atus Solikah, M.Ak.

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang potensial sebagai sumber penghasilan untuk membiayai pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Begitu pula dengan pendapatan daerah yang dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberi sumbangan dalam membiayai kepentingan umum dan kepentingan individu masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri tahun 2013 sampai dengan 2016.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yg digunakan adalah statistik deskriptif, rumus efektivitas dan kontribusi. Sampel yang dipakai adalah realisasi penerimaan PBB-P2 dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 – 2016 terbaru yang diperoleh dari Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2014 sampai dengan 2016 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri persentasenya >100%, sehingga dapat dikatakan sangat efektif setiap tahunnya. Pada tahun 2013 kontribusi yang diberikan PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Kediri persentasenya 25,29% dengan kriteria sedang. Adapun untuk tahun 2014-2016 persentasenya 10-20% dengan kriteria kurang.

KATA KUNCI: Efektivitas, Kontribusi, PBB-P2 dan PAD



I. LATAR BELAKANG

Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah itu ditetapkan dengan berbagai pertimbangan. Secara konseptual Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Penerimaan daerah perlu terus diupayakan dengan menggali sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat menyelenggarakan pembangunan, pemerintahan, pelayanan masyarakat yang semakin meningkat. Pembangunan nasional merupakan suatu langkah atau tindakan untuk memperbaharui kehidupan nasional. Upaya perbaikan sangat diperlukan terutama dibidang pengelolaan keuangan daerah. Berbagai kebijakan tentang keuangan daerah diarahkan agar daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membiayai penyelenggaraan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan diberikannya kewenangan oleh pemerintah pusat berupa kewenangan kuat, dan yang nyata,

bertanggungjawab secara proporsional. Kabupaten /Kota terus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah untuk mempercepat tercapainya kemandirian khususnya dalam bidang pemenuhan urusan rumah tangga.

Tujuan negara yang disepakati vaitu mensejahterakan rakyat dan kemakmuran menciptakan yang berasaskan kepada keadilan sosial. harus melakukan Negara pembangunan disegala bidang untuk dapat mencapai tujuan. Sebagai berdasarkan sebuah negara yang hukum material atau sosial, Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang kemakmuran menciptakan rakyat. Dana yang cukup untuk pembangunan merupakan faktor yang sangat penting guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha Pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya dengan melakukan pemungutan pajak.

Pengalihan PBB-P2 dari Pemerintah **Pusat** kepada pemerintahan Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, pengadministrasian, penetapan, pemungutan/penagihan dan pelayanan



PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Diharapkan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru. memberikan besar dalam kewenangan lebih perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Kabupaten Kediri Tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menunjukan kemampuan asli daerah untuk memudahkan bagi Pemerintah Daerah melakukan pembangunan diberbagai sektor didalamnya. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang memberikan dapat peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi

SANTI WIDYAYANA| 13.1.02.01.0038

Fak. Ekonomi – Prodi Akuntansi

penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak pusat karena obyeknya di daerah, maka daerah mendapat bagian yang lebih besar. Penanganan dan pengelolaan yang intensif lebih sangat diperlukan mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan (PBB-P2) Perkotaan bagi kelancaran kelangsungan dan pembangunan. Penanganan dan diharapkan pengelolaan tersebut mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak. Penanganan dan pengelolaan dapat diwujudkan dalam pajak pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Diharapkan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku saat ini Undang-Undang yaitu nomor



Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Untuk merealisasikan salah satu tujuan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pentingnya peran pajak dalam sistem ekonomi, perlu adanya peran dari beberapa pihak yang nantinya dapat terhimpun untuk menjadi satu menunjang keberhasilan proses pembangunan, yaitu masyarakat baik golongan atas, menengah ataupun bawah serta pemerintah sebagai pengelola dan pengatur proses pembangunan ini. baik Kerjasama yang antara masyarakat dengan lembaga pemerintah dapat memberikan efek positif dalam pembangunan daerah. Karena dengan demikian, tujuan pembayaran pajak yaitu untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata akan terwujud dalam bentuk pembangunan diberbagai sektor.

Dalam UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa PBB-P2 Paling lambat tanggal 1 Januari 2014 harus sudah dikelola oleh kabupaten/kota sudah siap untuk mengelola PBB-P2, yang dibuktikan dengan telah disahkannya Perda yang mengatur tentang PBB-P2 mulai tahun tersebut. Dalam hal ini Kabupaten Kediri telah melaksanakan Pemungutan PBB-P2 sejak tahun 2013.

Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) membawa dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri tahun 2012 sebelum pengalihan ke daerah yang diperoleh dari Badan Pendapatan (Bapenda), Daerah diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Kediri sebesar Rp. 129.298.996.769,19 dan pada tahun 2013 setelah pengalihan ke daerah menjadi sebesar Rp. 203.212.445.367,07. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terjadi selisih atau kenaikan penerimaan PAD yang signifikan di tahun 2013. Salah satu penyebab kenaikan PAD tersebut

> simki.unpkediri.ac.id || 5||



merupakan dampak dari dikelolanya PBB-P2 Kabupaten Kediri yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 51.397.456.192,00 pada tahun 2013 (Bapenda Kabupaten Kediri, 2017).

Efektifitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:134) adalah "ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya". Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Kontribusi berasal dari bahasa inggris vaitu contribute, contribution yang maknanya adalah keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu proses. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotan) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula (Mahmudi, 2010: 12).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan (PBB-P2) Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri tahun 2013-2016. Dan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri tahun 2013-2016.

II. METODE PENELITIAN

Variabel penelitian dalam hal ini adalah Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yang digunakan adalah Kuantitatif. pendekatan Tempat penelitian di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri. Waktu penelitian Maret sampai dengan Juni 2017.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kediri tahun 2013 sampai dengan 2016. Teknik analisis yang digunakan adalah



analisis efektivitas dan kontribusi, yaitu dengan mengukur tingkat efektifitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Kediri 2013-2016.

Rumus efektifitas sebagai berikut:

Efektivitas =	Realisasi Penerimaan PBB-P2	
	Target Pajak PBB-P2	x100%

Rumus kontribusi sebagai berikut:

Kontribusi =	Realisasi penerimaan PBB-P2	1000/
	Target PAD	- x100%

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis seberapa besar tingkat efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menghitung kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri tahun 2013 sampai dengan 2016.

Berikut hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2013-2016

Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Tahun 2013-2016

Tahu n	Realisasi Penerimaan PBB-P2	Target PBB-P2	Tingkat Efektivit as (%)
2013	51.397.456.192	48.000.000.000	107,08
2014	58.847.992.959	57.250.000.000	102,83
2015	62.340.222.586	62.000.000.000	100,54
2016	65.461.133.079	64.000.000.000	102,29

SANTI WIDYAYANA| 13.1.02.01.0038 Fak. Ekonomi – Prodi Akuntansi Sumber: Laporan realisasi dan target Bapenda Kabupaten Kediri.

> Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah di atas, diiketahui bahwa target Pajak Bumi Perdesaan Bangunan Perkotaan (PBB-P2) yang pemerintah ditetapkan oleh Kabupaten Kediri meningkat setiap tahunnya, dengan rata-rata dari realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar 82,54%. Pada tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar 48.000.000.000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 51.397.456.192 dan memperoleh persentase sebesar 107,08%. Pada tahun 2014 target yang ditetapkan 57.250.000.000 Rp. dengan PBB-P2 realisasi penerimaan sebesar Rp. 58.847.992.959 dan memperoleh persentase 102,83%. Pada tahun 2015 target yang ditetapkan Rp. 62.000.000.000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 62.340.222.586 dan memperoleh persentase 100,54%. Pada tahun 2016 target yang ditetapkan Rp. 64.000.000.000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 65.461.133.079 dan memperoleh persentase 102,29%. Penerimaan Pajak Bumi dan



Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah dapat dikatakan sangat efektif, dikarenakan persentase penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Kediri dari tahun 2013 sampai dengan 2016 menunjukkan >100%. Hal ini sesuai dengan kriteria persentase yang telah ditetapkan oleh Memah, (2013: 37).

Hasil kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan dikategorikan perkotaan sangat baik apabila rasio yang dicapai diatas 50%. Dikatakan baik apabila rasio kontribusinya antara 40,10% sampai dengan 50%. Dan dikatakan baik apabila cukup rasio kontribusinya antara 30,10% sampai dengan 40%.

Berikut hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2013-2016:

Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Kediri tahun 2013-2016

Tah	Realisasi	Realisasi	Kont
un	Penerimaan	Penerimaan PAD	ribus
	PBB-P2 (Rp)	(Rp)	i (%)
2013	51.397.456.192	203.212.445.367	25,29
2014	58.847.992.959	295.295.340.021	19
2015	62.340222.586	314.229.978.678	19,83
2016	65.461.133.079	339.044.315.982	19,30

Sumber : Laporan realisasi dan

target Bapenda Kabupaten Kediri

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah di atas, dapat SANTI WIDYAYANA| 13.1.02.01.0038 Fak. Ekonomi – Prodi Akuntansi diketahui bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri pada tahun 2013 yaitu 25,29%, 2014 yaitu 19%, 2015 yaitu 19,83% dan 2016 yaitu 19,30%. Kontribusi tertinggi dengan kriteria sedang pada tahun 2013 yaitu sebesar 25,29%. Dari hasil perhitungan kontribusi pada tahun 2014 sampai dengan 2016 dikatakan kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri.

B. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri pada tahun 2013 sampai dengan 2016 persentasenya >100%, sehingga dapat dikatakan sangat efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2013 kontribusi yang diberikan PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Kediri persentasenya 25,29% dengan kriteria sedang.

simki.unpkediri.ac.id



Adapun untuk tahun 2014-2016 persentasenya 10-20% dengan kriteria kurang.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti. T.P, dkk. (2013). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Administrasi Publik (JAP), (*Online*) 2 (1): 47-52. *Universitas* Brawijava Fakultas Administrasi, Malang. Tersedia: https://administrasipublik.studentjo urnal.ub.ac.id/index.php/jap/article/ view/335/203.
- Kurniawan, A. (2017). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame, Retribusi, dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Kediri: FE UN PGRI
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____(2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.
- _____(2013). Perpajakan Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Memah, E.W. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Nurcholis, H. (2007) Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*,

Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

______. (2011). Metodologi Penelitian
Kombinasi. Bandung: Alfabeta.

_____. (2012). Metode Penelitian
Kombinasi (Mixed Methods).
Bandung: Alfabeta.

_____. (2013). Statistika Untuk
Penelitian. Bandung: Alfabeta.

_____. (2014). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta.

- Saputro, R, dkk. (2014). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli daerah PAD (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). E-Jurnal Administrasi Bisnis. Universitas Brawijaya. Tersedia:http://perpajakan.studentjo urnal.ub.ac.id/index.php/perpajakan /article/viewFile/43/37, di unduh 20 Maret 2017.
- Siahaan, (2013). "Pajak daerah dan retribusi daerah". Jakarta: Rajawali pers
- Tarigan, K.W. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pbb Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Kota Manado. Jurnal EMBA, (online)1, (3): 282-291. Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ekonomi, Manado. Tersedia: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1737, Di unduh 10 Mei 2017.
- Utiarahman, N.R, dkk. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tumohon

SANTI WIDYAYANA| 13.1.02.01.0038 Fak. Ekonomi – Prodi Akuntansi simki.unpkediri.ac.id || 9||



(Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon). Jurnal Berkala Ilmiah efisiensi, (Online), 16(2). Universitas Sam Ratulangi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manado. Tersedia: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/12384/119 60, Di unduh 20 Maret 2017.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Pemerintah Kabupaten Kediri No. 1 tahun 2011 tentang Pajak daerah

_____ No. 54 tahun 2014

Undang - Undang No. 28 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 34

No. 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah

No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah